

**KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL - KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS)**

TESIS

Oleh:

TONNY ADRIAN KRAAKE, SH

2102190073



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2025

**KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL - KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia**

Oleh:

TONNY ADRIAN KRAAKE, SH

210219007



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2025



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tommy Adrian Kraaka

NIM : 2102190073

Program Studi : Magister Hukum

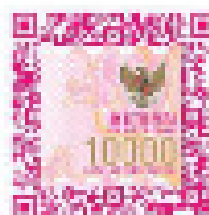
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Upaya Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 24 Januari 2023



(Tommy Adrian Kraaka)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS)”**

Oleh:

Nama : Tonny Adrian Kraake
NIM : 2102190073
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. John Pieris, SH., M.H., M.S.
NIDN: 9990463325

Pembimbing II

Dr. Fernando Silalahi, ST., SH., M.H.
NIDN: 0322117104

Ketua
Program Studi Magister Hukum

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIDN: 0305097105

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIDN: 001473/0320116402



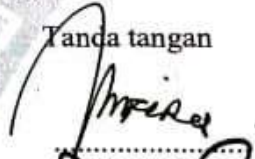
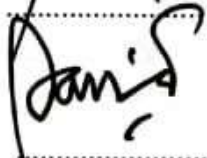
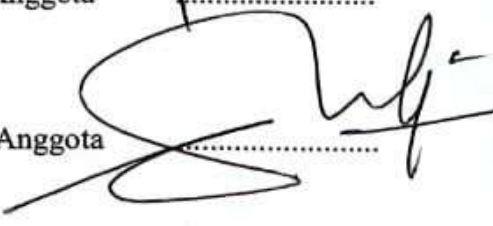
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 24 Januari 2025 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Tonny Adrian Kraake
 NIM : 2102190073
 Program Studi : Hukum Program Magister
 Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS)"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Prof.,Dr.,John Pieris, SH.,M.H.,M.S.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Fernando Silalahi., ST., SH., MH.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H	Sebagai Anggota	

Jakarta, 24 Januari 2025



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Tonny Adrian Kraake
NIM	: 2102190073
Fakultas	: Program Pasca Sarjana
Program Studi	: Magister Hukum
Jenis Tugas Akhir	: Tesis
Judul	:

Kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Upaya Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta

Pada Tanggal 24 Januari 2025



Tonny Adrian Kraake

KATA PENGANTAR

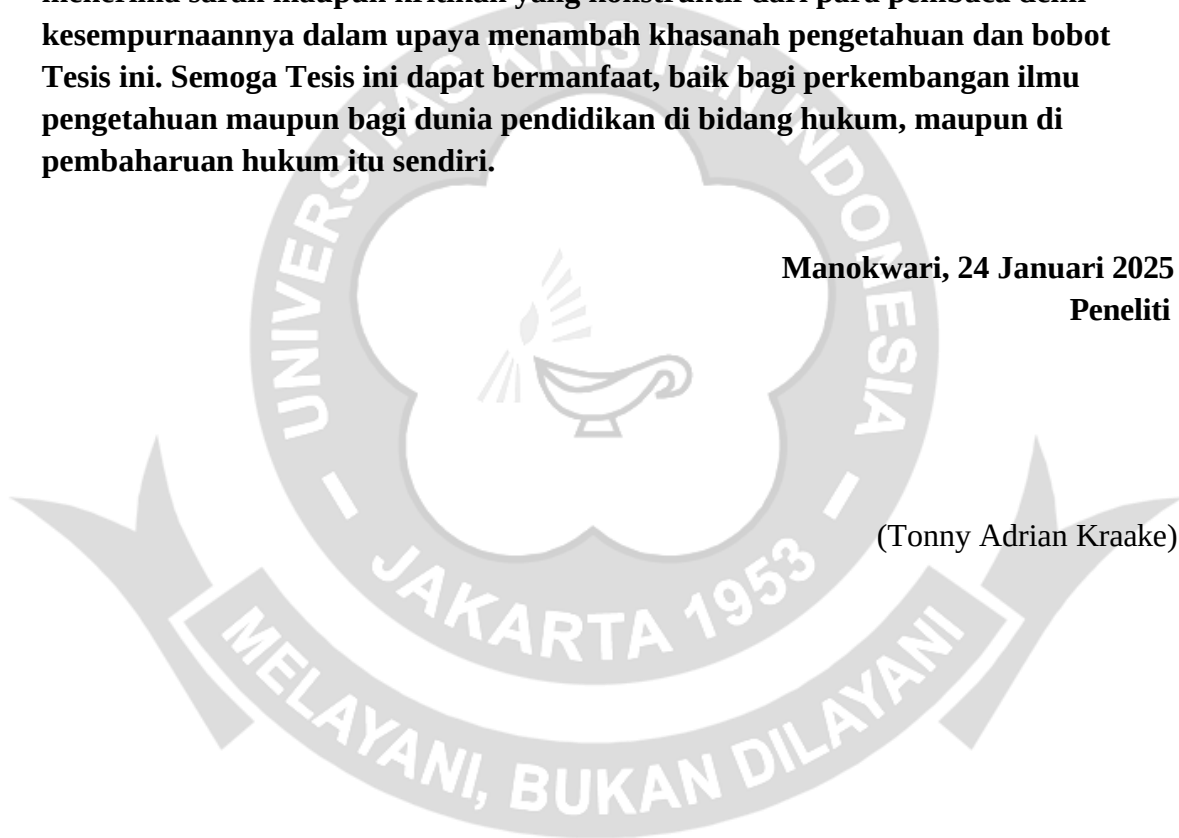
Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Upaya Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)”, tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Studi Magister Ilmu Hukum, program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam pembuatan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia pendidikan di bidang hukum, maupun di pembaharuan hukum itu sendiri.

Manokwari, 24 Januari 2025

Peneliti

(Tonny Adrian Kraake)



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
Abstrak	xi
Abstract.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konsep.....	12
E. Metode Penelitian	25
F. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN UMUM.....	34
A. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	34
B. Pemerintahan Daerah Provinsi Papua	48
C. Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat	55
BAB III	65
Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan	65
A. Upaya dan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Pelaksanaan JKN-KIS	67
B. Aspek Regulasi Dalam Mendukung Program JKN-KIS Di Kabupaten Manokwari Selatan.....	72
C. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan.....	77
D. Ketersediaan Tenaga Kesehatan di K Manokwari Selatan	84
BAB IV	98
Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS-KIS Kabupaten	

Manokwari Selatan Dalam Kaitannya Dengan Kemanfaatan Hukum Dikukur Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesehatan JKN-KIS.....	98
A. Kepuasan Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Program JKN-KIS.....	101
B. Kepuasan Terhadap Ketersediaan Sarana dan Prasarana JKN-KIS	105
C. Kepuasan Peserta BPJS Kesehatan Manokwari Selatan Terhadap Kualitas Pelayanan dan Ketersediaan Sarana dan Prasana Program JKN-KIS Di Kabupaten Manokwari Selatan	114
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis & Jumlah Kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Manokwari

Selatan..... 8

Tabel 3.1 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan 74

Tabel 3.2 Tenaga Kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan..... 80

Tabel 4.1 Kuesioner pertanyaan kepada Peserta BPJS Kesehatan Terhadap

Pelayanan Petugas Kesehatan Di Kabupaten Manokwari Selatan 97

Tabel 4.2 Kuesioner pertanyaan kepada Peserta BPJS Kesehatan Terhadap

Sarana dan Prasarana Kesehatan Di Kabupaten Manokwari Selatan 102



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Grafik Kepuasan Peserta BPJS JKN Skala Nasional Dalam Tahun

2016-2023 8



Abstrak

Hak atas jaminan sosial kesehatan merupakan hak asasi warga negara Indonesia yang dijamin dalam sila kelima Pancasila, UUD 1945 Pasal 28 H, dan berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bertujuan memastikan akses kesehatan yang merata, murah, dan berkualitas bagi seluruh rakyat. Pemerintah terus mengupayakan pemerataan kesehatan melalui kebijakan, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, yang mendorong kewajiban keikutsertaan dalam JKN sebagai syarat berbagai layanan publik, sebagai wujud nyata penerapan negara kesejahteraan.

Adapun permasalahan pertama ialah mengapa harus ada upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dalam mengoptimalisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui penyediaan sarana prasarana layanan Kesehatan, serta masalah yang kedua ialah Bagaimana pengaruh kepesertaan JKN-KIS yang lebih dari 95% kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan terhadap kemanfaatan hukum yang didapatkan pada program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Untuk itu menggunakan pisau analisis yaitu teori negara kesejahteraan (*welfare state*) dan teori kemanfaatan hukum.

Penelitian ini berfokus pada analisis dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur Program JKS-KIS, dan menambahkan pendekatan sosiologis melalui survei serta wawancara untuk mengumpulkan data empiris. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang menelaah hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*statute approach*), didukung oleh pendekatan sistematika hukum untuk memahami keterkaitan antara hukum dasar,

Pelaksanaan program JKN-KIS di Kabupaten Manokwari Selatan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk ketiadaan kebijakan instrumental, dan operasional secara logis dan terstruktur. Adapun keseluruhan dari penelitian ini menunjukkan bahwa JKN-KIS di Kabupaten Manokwari strategis berupa Peraturan Daerah, kurangnya fasilitas kesehatan, minimnya tenaga medis, dan rendahnya alokasi anggaran yang belum mencapai 10% APBD sesuai Surat Edaran Mendagri. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi program JKN-KIS masih jauh dari konsep *welfare state*. Dari segi kemanfaatan, tingkat kepuasan peserta terhadap pelayanan kesehatan masih rendah akibat keterbatasan sarana prasarana, meskipun pelayanan oleh petugas kesehatan menunjukkan hasil yang cukup baik, disarankan agar pemerintah pusat lebih terlibat, fasilitas pendukung seperti akses internet dan mobilitas ditingkatkan, serta kualitas pelayanan kesehatan diperbaiki melalui pembentukan SOP dan pelatihan petugas.

Kata kunci: OPTIMALISASI JKN-KIS, MANFAAT HUKUM, PELAYANAN KESEHATAN

Abstract

The right to social health security is a human right of Indonesian citizens guaranteed in the fifth principle of Pancasila, the 1945 Constitution Article 28 H, and various regulations, including Law Number 36 of 2009 concerning Health, as well as Laws Number 40 of 2004 and Number 24 of 2011 concerning the National Social Security System (SJSN) and BPJS. The National Health Insurance Program (JKN) through BPJS Health and the Healthy Indonesia Card (KIS) aims to ensure equitable, cheap, and quality access to health for all people, especially the underprivileged. The government continues to strive for equitable health through policies, including Presidential Instruction Number 1 of 2022, which encourages mandatory participation in JKN as a condition for various public services, as a concrete manifestation of implementing a welfare state that is in line with the constitutional mandate and ideals of the Indonesian nation. The South Manokwari Regency area is optimizing the National Health Insurance-Indonesia Healthy Card (JKN-KIS) program through the provision of health service infrastructure, and the second problem is how will JKN-KIS membership, which is more than 95% of BPJS Health membership in South Manokwari Regency, affect legal benefits obtained from the BPJS Health National Health Insurance program? For this reason, we use analytical tools, namely welfare state theory and legal benefit theory.

This research focuses on analyzing legal documents, such as statutory regulations governing the JKS-KIS Program, and adds a sociological approach through surveys and interviews to collect empirical data. The main approach used is the normative approach, which examines law as written norms in statutory regulations (statute approach), supported by a systematic legal approach to understand the relationship between basic, instrumental, and operational law in a logical and structured manner.

The implementation of the JKN-KIS program in South Manokwari Regency still faces various obstacles, including the absence of logical and structured instrumental and operational policies. Overall this research shows that JKN-KIS in Manokwari Regency is strategic in the form of regional regulations, lack of health facilities, lack of medical personnel medical, and low budget allocatio, which has not yet reached 10% of the APBD according to the Circular Letter of the Minister of Home Affairs. This shows that optimizing the JKN-KIS program is still far from the welfare state concept. In terms of usefulness, the level of participant satisfaction with health services is still low due to limited infrastructure, although services by health workers show quite good results. To increase the optimization and benefits of the program, it is recommended that the central government be more involved, support facilities such as internet access and mobility be improved, and the quality of health services be improved through the establishment of SOPs and training of officers.

Keywords: JKN-KIS OPTIMIZATION, LEGAL BENEFITS, HEALTH SERVICES